

**Menakar Kesukarelaan Warga dalam Politik
Pada Pemilu di Kabupaten Lebong**



Oleh:

**Fakhruddin, M.Pd.I
Baryanto, S.Pd., MM.
Muhammad Anshori, S.Sos.I**

**Kerja Sama
Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup
dengan
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Lebong**

Tahun 2015

Laporan Hasil Penelitian

**Menakar Kesukarelaan Warga dalam Politik
Pada Pemilu di Kabupaten Lebong**



Oleh:

Fakhruddin,M.Pd.I

Baryanto, S.Pd., MM.

Muhammad Anshori, S.Sos.I

Kerja Sama

Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat (P3M)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

dengan

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

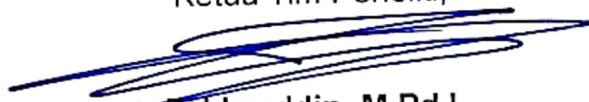
Kabupaten Lebong

Tahun 2015

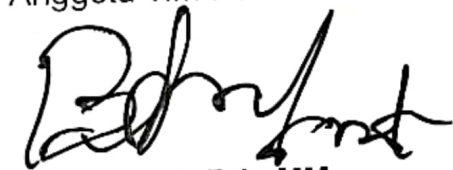
HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN PENELITIAN

1.	a. Judul Penelitian	:	Menakar Kesukarelaan Warga dalam Politik Pada Pemilu di Kabupaten Lebong
	b. Jenis Penelitian	:	Ilmu Terapan
	c. Bidang Ilmu	:	Sosiologi Politik
	d. Kategori Penelitian	:	Kelompok
2.	Ketua Tim Peneliti		
	Nama Lengkap	:	Fakhruddin, M.Pd.I
	NIP	:	197501122006041009
	Pangkat/Gol.	:	Penata/Lektor/IIId
	Jabatan Sekarang	:	Tenaga pengajar STAIN Curup
3.	Anggota Tim Peneliti		
	Nama Lengkap	:	Baryanto, S.Pd., MM
	NIP	:	19690723 199903 1 004
	Pangkat/Gol.	:	Pembina/Asisten Ahli/Va
	Jabatan Sekarang	:	Tenaga pengajar
4.	Anggota Tim Peneliti		
	Nama Lengkap	:	Muhammad Anshori, S.Sos.I
	NIP	:	
	Pangkat/Gol.	:	
	Jabatan Sekarang	:	Staff P3M STAIN Curup
5.	Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Lebong
6.	Jangka Waktu Penelitian	:	Juni s.d. Juli 2015

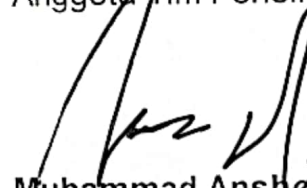
Curup, 15 Juli 2015
Ketua Tim Peneliti,

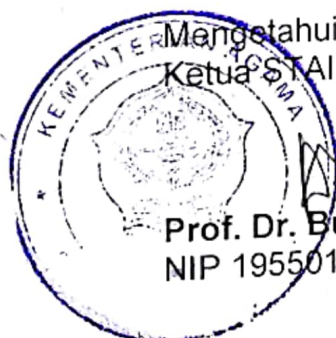

Fakhruddin, M.Pd.I
NIP 197501122006041009

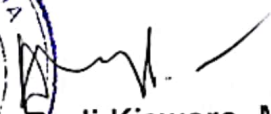
Anggota Tim Peneliti


Baryanto, S.Pd., MM
NIP 19690723 199903 1 004

Anggota Tim Peneliti


Muhammad Anshori, S.Sos.I
NIP



Mengetahui:
Ketua STAIN Curup,

Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
NIP 195501111976031002



Muhammad Anshori, S.Sos.I
NIP

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT laporan penelitian yang berjudul **Menakar Kesukarelaan Warga dalam Politik Pada Pemilu di Kabupaten Lebong** ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan atas selesainya penelitian ini yang antara lain pada :

1. Ketua KPU Lebong yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian ini
2. Bapak Ketua STAIN Curup yang telah memberi dorongan untuk melaksanakan penelitian ini.
3. Responden yang berkenan membri jawaban dan masukan tentang data yang diperlukan
4. Serta seluruh pihak yang telah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam proses dan penyelesaian penelitian ini.

Semoga Allah membalas jasa baik semua pihak yang telah membantu proses penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Akhirnya kritikan dan masukan dari pembaca dan semua pihak dengan senang hati akan diterima demi penyempurnaan penelitian yang akan datang.

Curup, 15 Juli 2015
Ketua Peneliti,



Fakhruddin, M.Pd.I
NIP 197501122006041009

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar Peneliti	iii
Daftar Isi	iv
Abstrak.....	
Bab 1 Pendahuluan	
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	11
Tujuan Penelitian	12
Manfaat Penelitian	12
Metodologi Penelitian.....	13
Bab 2 Kajian Teoritis	
Kesukarelaan Warga	24
Kesukarelaan Politik	28
Kesukarelaan Warga Dalam Politik.....	30
Perilaku Pemilih	34
Orientasi Pemilih.....	39
Jenis-Jenis Pemilih	39
Pentingnya Pemilu	42
Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung	42
Bab 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan	
Kondisi Obyektif Wilayah Penelitian.....	45
Pilkada Kabupaten Lebong	47
Laporan Penelitian	48
Penyajian dan Pembahasan Hasil Penelitian	52
Faktor-Faktor Kesukarelaan Warga Dalam Politik	59
Pembahasan Hasil Penelitian	64
Bab 4 Penutup	
Simpulan.....	66
Implementasi Hasil Penelitian dan Saran	69
Daftar Pustaka	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

Abstraks

Kesukarelaan warga dalam politik berpengaruh luas dalam kehidupan politik. Absennya kesukarelaan warga dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Dalam jangka pendek, biaya politik mahal menjadi resiko yang harus ditanggung karena segalanya serba berbayar. Dalam jangka panjang, korupsi menjadi virus endemik yang pasti menyerang. Sebaliknya, tatanan demokrasi semakin kuat apabila kesukarelaan warga tumbuh dan hidup didalam masyarakat. Dari pemilu ke pemilu kesukarelaan warga mengalami pasang surut. Kesukarelaan warga yang kehadirannya ditandai dengan munculnya relawan dari berbagai kalangan kuat muncul dalam pemilu 2014. Pertanyaannya, apa faktor yang mempengaruhi munculnya kesukarelaan politik warga dan faktor apa yang menghambatnya? Kebijakan apa saja yang dapat ditempuh untuk menumbuhkan dan memperkuat kesukarelaan warga dalam politik? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi, yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Data kuantitatif deskriptif tentang kesukarelaan warga dalam politik dengan sub-variabel kesadaran, kebebasan, komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatan warga dalam politik terhadap pemilu tahun 2014 ialah berada pada taraf cukup tinggi sehingga boleh diartikan bahwa tingkat kesukarelaan warga dalam politik terhadap Pemilu tahun 2014 berada pada tingkatan cukup tinggi yang berdekatan cenderung mendekati sedang. Faktor faktor yang menyebabkan warga mau atau tidak mau ikut secara sukarela berpartisipasi dalam politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, Status sosial dan ekonomi, Afiliasi politik, pengalaman berorganisasi, Kepercayaan terhadap pemerintah, media massa, dan forum diskusi.

Kata Kunci: Kesukarelaan, Politik, dan Pemilu.

Bab 1

Perdahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Kesukarelaan warga dalam politik berpengaruh luas dalam kehidupan politik. Absennya kesukarelaan warga dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Dalam jangka pendek, biaya politik mahal menjadi resiko yang harus ditanggung karena segalanya serba berbayar. Dalam jangka panjang, korupsi menjadi virus endemik yang pasti menyerang. Sebaliknya, tatanan demokrasi semakin kuat apabila kesukarelaan warga tumbuh dan hidup didalam masyarakat. Dari pemilu ke pemilu kesukarelaan warga mengalami pasang surut. Kesukarelaan warga yang kehadirannya ditandai dengan munculnya relawan dari berbagai kalangan kuat muncul dalam pemilu 2014. Pertanyaannya, apa faktor yang mempengaruhi munculnya kesukarelaan politik warga dan faktor apa yang menghambatnya? Kebijakan apa saja yang dapat ditempuh untuk menumbuhkan dan memperkuat kesukarelaan warga dalam politik?

Karena demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya

yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara¹.

Kata ini berasal dari bahasa Yunani *dēmokratía* "kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari *dêmos* "rakyat" dan *kratos* "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari *aristocratie* "kekuasaan elit"². Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama.

Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara didunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan system politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

¹ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo. 1999.

² Horal, F Gosnel. 1934. *Ensyklopedia Of The Social Science*. New York : Mc Grew Hill Book Company

Terdapat beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi, yaitu :

1. Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala.
2. Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif.
3. Adanya perlindungan terhadap HAM.
4. Berkembangnya *civil society* dalam masyarakat.³

Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistem politik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan. Karenanya, sistem politik demokrasi sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi yang merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi memilih dalam pemilu adalah keikutsertaan atau keterlibatan seseorang atau warga masyarakat berperan secara aktif dalam proses pemilu.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu berkaitan dengan legitimasi hasil pemilu (pemerintahan), semakin tinggi tingkat partisipasi, maka semakin legitimasi pemerintahan itu. Di dalam proses berpartisipasi seharusnya tidak melakukan keberpihakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, diharapkan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan

³ Surbakti Op. cit.

mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian implementasi partisipasi masyarakat seharusnya anggota masyarakat merasa tidak lagi menjadi objek, tetapi menjadi subjek dari kebijakan pemerintah dan harus dapat mewakili kepentingan masyarakat. Partisipasi warga masyarakat merupakan cerminan dari sikap kesukarelaan mereka dalam Pemilu, sehingga munculnya relawan-relawan demokrasi.

Relawan Demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Pelibatan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Relawan Demokrasi bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kualitas proses pemilu.
2. Meningkatkan partisipasi pemilih
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi

Untuk mengikuti program Relawan Demokrasi, seseorang harus memiliki persyaratan diantaranya; a. Warga Negara Indonesia, b. Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun, c. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat, d. Berdomisili di wilayah setempat, e. Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir, f. Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu, g. Terdaftar sebagai pemilih, h. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, i. Bertanggungjawab dan berakhlak baik, j. Bukan bagian dari penyelenggara pemilu, k. Memiliki pengalaman terkait kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan /kemahasiswaan, dan l. Tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana.

Guna meningkatkan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi mengikuti Training of trainer untuk Relawan Demokrasi dengan materi; a. Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi, b. Pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis, c. Kode etik relawan, d. Teknik-teknik berkomunikasi publik, dan e. Materi lain yang relevan.

Dalam menjalankan tugasnya relawan demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain: a. Simulasi, b. Bermain peran/role playing, c. Diskusi kelompok/FGD, d. Ceramah, e. Alat bantu (visual dan non visual), dan f. Posting materi sosialisasi ke media sosial.

Agenda kegiatan Relawan Demokrasi meliputi: a. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping), b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran, c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan, d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain, e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal, dan f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kab/Kota.

Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Relawan pemilu diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu: a. Bersikap independen, imparial, dan non partisan terhadap peserta pemilu, b. Tidak melakukan tindak kekerasan, c. Menghormati adat dan budaya setempat, d. Tidak bertindak diskriminatif, dan e. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik diberikan sanksi pemberhentian sebagai Relawan Demokrasi, setelah dilakukan klarifikasi.

Strategi penyampaian sosialisasi meliputi :

- a. Terpadu, sistematis dan komprehensif;
 1. Terpadu, penyelenggaraan sosialisasi dilakukan secara simultan dengan pembagian peran diantara penyelenggara guna mencapai tujuan.
 2. Sistematis, penyampaian materi sosialisasi secara runtut dan tepat sasaran. Dan 2.

Komprehensif, penyampaian materi dengan menggunakan metode, bahan dan media tepat sasaran.

- b. Materi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran dengan dukungan metode yang memadai.
- c. Penggalangan dukungan pemangku kepentingan.

Metode Sosialisasi Pemilu meliputi; a. Komunikasi melalui Tatap Muka; b. Komunikasi melalui media massa cetak dan elektronik; c. Komunikasi mobilisasi massa; dan d. Komunikasi melalui media sosial. Sedang media yang digunakan meliputi: a. Media Luar Ruang dan Bahan Cetak; b. Media Cetak dan Elektronik; c. Media Tradisional; dan d. Media Jejaring Sosial;

Adapun kelompok sasaran; a. Masyarakat Umum, b. Pemilih Pemula (pelajar dan mahasiswa), c. Perempuan (komunitas perempuan dan PKK), d. Pengemuka pendapat (tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seniman), e. Petani, buruh dan kelompok pekerja lainnya (pedagang, nelayan, dan lainnya), f. Wartawan dan kelompok media lainnya (media cetak, elektronik, radio, dan komunitas), g. Partai Politik, h. Pemerintah Daerah, TNI/Polri, i. Pengawas dan Pemantau, j. LSM/Ormas, k. Pemilih dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat, masyarakat terpendek, penghuni LP, dll), dan l. Penyelenggara Pemilu.

Intinya relawan demokrasi merupakan kelompok sukarelawan mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) yang baik dan benar yang merupakan salah satu ciri pokok demokrasi. Sebuah negara tak bisa disebut demokratis, jika di dalamnya tidak terdapat

Pemilu yang diselenggarakan secara periodik dan berkala untuk melakukan sirkulasi elite politik. Indonesia merupakan negara yang setelah berhasil menyelenggarakan sejak Pemilu 2004 disebut sebagai negara terdemokratis ketiga setelah Amerika dan India. Gelar tersebut bukan saja karena Indonesia telah terbebas dari rezim birokratik-otoritarian Orde Baru, tetapi juga karena Pemilu dapat diselenggarakan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai sebuah lembaga independen penyelenggara Pemilu yang personil-personilnya secara umum memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni.

Selain itu, saat itu nuansa euforia demokrasi pasca otoritarianisme masih sangat terasa dan disambut masyarakat dengan senang hati dan bahkan antusias untuk memilih wakil-wakil dan pemimpin rakyat yang sesuai dengan harapan mereka. Secara umum, rakyat pemilih datang ke TPS-TPS karena dorongan dari diri mereka sendiri untuk melahirkan wakil dan pemimpin rakyat yang akan mampu menciptakan kebaikan bersama.

Menurut Wiliam Ebenstein dalam karyanya yang berjudul *Today's Isms: Socialism, Capitalism, Fascism, Communism, and Libertarianism*, setidaknya ada delapan kriteria dan dasar psikologis demokrasi, yakni akal sehat, pengutamaan individu, negara tak lebih dari sekedar alat untuk mencapai tujuan bersama, hubungan antara negara dan rakyat diatur berdasar hukum, persamaan hak asasi manusia, prosedur demokrasi yang

dijalankan secara benar mengingat tujuan tidak bisa dipisahkan dari cara atau alat yang digunakan, dan prinsip kesukarelaan (voluntarism).

Demokrasi meniscayakan kesukarelaan masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Tanpa kesukarelaan tak ada demokrasi, karena sesungguhnya mereka mengalami keterpaksaan dalam menentukan pilihan. Dalam tradisi masyarakat di Indonesia saat ini kesukarelaan dalam politik bisa dikatakan sangatlah rendah. Nampaknya, hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam memahami makna politik. Politik dianggap sebagai arena yang kotor dan jahat yang dihuni oleh mereka yang hanya ingin memperkaya diri sendiri. Karena itu, rakyat menuntut imbalan secara langsung untuk dukungan politik yang mereka berikan.

Harus diakui, menurut Muhammad Nasih; masih banyak terjadi tidak adanya kesukarelaan di antara pemilih dan juga kontestan politik. Masyarakat tidak mau memilih jika tidak diberi imbalan uang atau imbalan-imbalan konkret dalam bentuk lainnya. Dalam konteks ini, kesukarelaan masyarakat telah didistorsi oleh praktik politik-uang. Mereka menjadikan uang sebagai salah satu faktor dominan dalam menentukan pilihan.

Sementara para kontestan pemilu memberikan uang juga karena keterpaksaan. Walaupun sebelumnya tidak pernah dikenal sebagai orang yang dermawan, tetapi pada saat menjelang Pemilu mendadak menjadi orang yang sangat royal kepada masyarakat. Para kontestan pemilu melakukan itu tentunya karena memiliki

interest. Mereka terpaksa, karena harus mengikuti langgam realitas pasar yang memang menginginkan itu. Jika mereka tidak mampu menahan hasrat untuk semata-mata berkuasa, maka jalan praktik politik uanglah yang mereka tempuh. Dan jika hasrat berkuasa para kontestan pemilu terlalu tinggi, maka mereka akan mempertaruhkan sebagian besar harta kekayaan yang mereka miliki untuk memperebutkan kekuasaan; bahkan walau untuk itu mereka mesti harus berutang.

Itu terbukti dengan banyaknya kontestan pemilu yang setelah selesai Pemilu dan tidak mendapatkan perolehan suara yang signifikan kemudian menjadi stress dan bahkan meninggal dunia karena terkena serangan jantung akut. Setidaknya mereka melakukan tindakan-tindakan yang sungguh ironis dan memalukan, seperti meminta kembali barang-barang yang telah mereka berikan, baik untuk pribadi-pribadi tertentu maupun untuk kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga tertentu.

Harusnya, kejadian-kejadian seperti itu tak perlu terjadi jika masing-masing antara pemilih dan para kontestan pemilu memiliki saling percaya. Ketidadaan sikap saling percaya inilah yang menyebabkan uang menjadi jalan terakhir. Rakyat pemilih menginginkan imbalan yang berbentuk instant. Sedangkan para kontestan pemilu yang sebelumnya tidak pernah berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan juga menggunakan uang sebagai jalan instant untuk merebut kekuasaan.

Akibatnya, Pemilu diwarnai dengan transaksi-transaksi yang sesungguhnya masuk dalam kategori politik-uang yang oleh Undang-Undang jelas dilarang. Jarang sekali kontestan pemilu yang berani melakukan langkah melawan arus dengan melakukan pendidikan politik kepada rakyat dengan menjelaskan bahwa praktik-politik uang merupakan praktik pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Berangkat dari latar belakang di atas, diperlukan untuk mendeteksi tingkat kesukarelaan warga dalam politik. Deteksi tersebut dilakukan dalam penelitian dengan judul: **Menakar Kesukarelaan Warga dalam Politik Pada Pemilu di Kabupaten Lebong**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicari pemecahannya. Atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah.⁴

⁴ Husani Usman dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial* , Bandung :Bumi Aksara. 2004, hal 26.

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka yang jadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana tingkat kesukarelaan warga dalam politik (Political voluntarism) pada Pilkada di Kabupaten Lebong tahun 2015 nanti?
2. Apa faktor yang mempengaruhi munculnya kesukarelaan warga dalam politik (Political voluntarism) pada Pilkada di Kabupaten Lebong tahun 2015 nanti?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesukarelaan politik di Kabupaten Lebong.
2. Untuk mengetahui, faktor- faktor yang mempengaruhi munculnya kesukarelaan politik warga.
3. Untuk mengetahui, faktor- faktor yang menghambat munculnya kesukarelaan politik warga
4. Untuk mengetahui, kebijakan apa saja yang dapat ditempuh untuk menumbuhkan dan memperkuat kesukarelaan warga dalam politik

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat menambah khazanah kepustakaan politik.
2. Sebagai rujukan bagi KPU untuk mengambil kebijakan penyelenggaraan pemilu kada.

3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan penulis dalam meneliti fenomena politik yang terjadi, sehingga menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diteliti.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi. Menurut Sugiyono, “metode penelitian kombinasi adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif”.⁵ Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti menggunakan metode kombinasi ini. Alasan tersebut antara lain adalah:⁶

1. Different research question

Dalam penelitian ini terdapat rumasan masalah yang berbeda, pertama adalah “Bagaimana tingkat kesukarelaan warga dalam politik (Political voluntarism) pada Pilkada di Kabupaten Lebong tahun 2015 nanti?” dalam pengumpulan data dan analisa lebih ditekankan penggunaan metode kuantitatif. Kedua adalah “Apa faktor yang mempengaruhi munculnya kesukarelaan warga dalam politik (Political voluntarism) pada Pilkada di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 nanti?” dalam pengumpulan data dan analisa lebih ditekankan penggunaan metode kualitatif. Selanjutnya kedua

⁵ Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung, CV. Alfabeta. Halaman 397

⁶ Jonathan Sarwono, 2011, Mixed Methods Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo. Halaman 7-10

data tersebut dilakukan meta-analisis untuk mengetahui kedua data tersebut saling memperkuat, bertentangan atau memperlemah.

2. *Triangulation*

Triangulation merupakan penggunaan lebih dari satu metode untuk digunakan sebagai cek silang. Dengan beberapa temuan yang berbeda diharapkan menghasilkan temuan yang sama.

3. *Offset*

Sarana penyeimbang, data kuantitatif (kuesioner) yang diperoleh digunakan sebagai penyeimbang data kualitatif (wawancara mendalam).

4. *Completeness*

Sarana melengkapi antar metode. Peneliti berharap agar data yang diperoleh dari masing-masing metode, baik itu kualitatif maupun kuantitatif akan saling melengkapi satu sama lain sehingga temuan lebih bersifat komprehensif.

5. *Confirm and discover*

Sarana konfirmasi, dengan penggunaan dua metode (kualitatif dan kuantitatif) bertujuan untuk mengkonfirmasi lebih lanjut informasi yang diperoleh peneliti sehingga menghasilkan temuan-temuan yang lebih valid.

Model penelitian kombinasi yang digunakan adalah *concurrent triangulation* (campuran seimbang) yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dengan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara

seimbang dan bersama-sama (50% metode kuantitatif dan 50% metode kualitatif) dalam waktu yang sama, tetapi independen untuk menjawab rumusan masalah sejenis.⁷ *Model concurrent triangulation* ini dipilih dengan tujuan agar dapat mengatasi kelemahan atau kekurangan dari satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain sehingga diperoleh data yang lebih lengkap, valid, reliabel, objektif dan waktu yang digunakan lebih efisien.

Terdapat dua bentuk rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan di atas. Kedua rumusan masalah tersebut merupakan rumusan masalah yang bersifat deskriptif sehingga peneliti akan menjelaskan dan mengeksplorasi serta memotret situasi sosial yang terjadi pada masyarakat pemilih secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Fokus penggabungan dua metode (kualitatif dan kuantitatif) lebih pada teknik pengumpulan data dan analisis data, sehingga peneliti dapat membandingkan seluruh data temuan dari kedua metode tersebut, yang selanjutnya diperoleh kesimpulan dan saran apakah kedua data saling memperkuat, memperlemah atau bertentangan. Untuk rumusan masalah 1 dan 2 tentang, peneliti lebih menekankan penggunaan teknik pengumpulan data secara kuantitatif yaitu dengan menyebarkan sejumlah kuesioner terhadap sejumlah masyarakat yang mempunyai hak pilih. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah 3, peneliti lebih menekankan

⁷ Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung, CV. Alfabeta. Halaman 499 77

penggunaan teknik pengumpulan data secara kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam terhadap masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Pada penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji teori yang telah ditetapkan. Hal ini agar peneliti memperoleh data yang lengkap dan gambaran untuk menemukan persentase kecendrungan kedatangan pemilih ke TPS dan penggunaan hak pilih/suaranya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan berusaha untuk membrikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti dan menjadi pokok permasalahan. Nawawi mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai : “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain)”. Adapun cirri-ciri pokok metode deskriptif adalah :

- a. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-

masalah yang bersifat aktual.

- b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya.

Adapun bentuk dari metode deskriptif yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah survey (*survey studies*) yaitu survey kemasyarakatan (*community survey*). Menurut Nawawi maksudkan untuk mengungkapkan aspek atau beberapa aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat. Melalui penelitian ini dikumpulkan data untuk mengambil kesimpulan tentang pendapat, keinginan, kebutuhan, kondisi dan lain-lain di dalam masyarakat mengenai aspek yang diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lebong, lokasi penelitian tersebut adalah daerah tempat peneliti bertempat tinggal, sehingga akan lebih mudah bagi peneliti mendapatkan data baik dari masyarakat maupun dari instansi yang terkait dengan penelitian nantinya. Selain itu akan lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat sehingga akan mempermudah dalam hal memperoleh data dari para responden.

3. Populasi dan Sampel

Populasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “population” yang berarti jumlah penduduk. Populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dsb, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014
Kabupaten Lebong**

NO.	NAMA KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH	KET.		
			DESA	TPS	
1	AMEN	5.621	10	19	
2	BINGIN KUNING	7.927	9	20	
3	LEBONG ATAS DAN PADANG BANO	7.625	11	28	
4	LEBONG SAKTI	6.889	9	16	
5	LEBONG SELATAN	10.905	8	29	
6	LEBONG TENGAH	8.384	11	20	
7	LEBONG UTARA	11.975	12	31	
8	PELABAI	4.757	8	12	
9	PINANG BELAPIS	3.723	8	12	
10	RIMBO PENGADANG	3.436	6	12	
11	TOPOS	4.519	8	12	
12	URAM JAYA	4.509	7	13	
J U M L A H		80.270	107	224	

Maka, yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah semua Daftar Pemilih Tetap Kabupaten lebong, saat ini sebanyak 80,270 pemilih sesuai dengan pemilih dari DPT tahun 2013 lalu. Jumlah DPT tersebar dalam 12 kecamatan sebagaimana tabel di atas.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus *slovin*⁸ yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

keterangan :

⁸ Consuelo, G. Selvilla. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta : UI Press. 1993. Hal 161

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Nilai kritis(batas ketelitian) yang diinginkan,yaitu sebesar 10% dengan tingkat kepercayaan 90%

$$n = \frac{80,270}{1+80,270}$$

$$= \frac{80,270}{81,270}$$

$$= 988$$

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel teknik *probability sampel*, dimana setiap responden dari semua populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, dipergunakan dua sumber pengumpulan data, yaitu: pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.

- a. Data Primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer dalam penelitian ini dapat berasal responden yang memberikan suara dalam pilkada. Data dikumpulkan dengan Kuesioner, dengan cara memberikan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder yaitu semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian (*Library Research*) dan pencatatan dokumen antara lain dengan

mengumpulkan data dari buku-buku, literature, jurnal ,majalah, Koran dan internet yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan metode penelitian, dalam menganalisa data, data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Metode kualitatif dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati.

Marshall dan Rossman mengajukan teknik analisa data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan⁹, diantaranya :

a. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui angket dan wawancara mendalam (*indepth inteviewer*), dimana data tersebut direkam dengan tape recorder dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

b. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban

⁹ Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokkan tersebut oleh peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

c. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan

antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan factor-faktor yang ada.

d. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penejelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternative penjelasan lain tetnag kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdpat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

e. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakaiadalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan significant other. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan significant other, dibaca berulang kali sehingga

penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

Bab 2

Kajian Teoretis

Bagian ini merupakan unsur yang paling penting di dalam penelitian, karena pada bagian ini peneliti mencoba menjelaskan fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitiannya. Teori menurut Masri Singarimbun dan Sofian effendi dalam buku *Metode Penelitian Sosial* mengatakan, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, defenisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹

A. Kesukarelaan Warga

Kesukarelaan adalah suatu nilai dan perbuatan yang murni. Bahkan, dalam hal-hal dan keadaan-keadaan tertentu, kesukarelaan dianggap suci. Kerana itulah, setiap yang terlibat dalam kerja-kerja dan program-program kesukarelaan, baik secara individu ataupun secara berkelompok, baik secara sistematis ataupun tidak, dan baik sumbangannya itu adalah besar ataupun kecil, ia dianggap sebagai kerja dan program yang terpuji.

Kesukarelaan juga adalah satu nilai yang disanjung tinggi yang telah memungkinkan manusia terus hidup secara bermasyarakat dan berkerja sama dan kemanusiaan dalam maksudnya yang sebenar, dari dahulu hingga sekarang, dan diyakini akan sampai kapanpun.

¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : LP3ES, 1998, hal

Perkataan “sukarela”, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bermakna “dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa-paksa, tidak dikerah dan dengan rela hati”. Perkataan “kesukarelaan” juga membawa makna “sikap sukarela”. Selanjutnya, mereka yang melakukan sesuatu dengan sukarela dipanggil “sukarelawan” bagi lelaki dan “sukarelawati” bagi perempuan.

Berdasarkan makna tersebut, kesukarelaan dapat dimaksudkan sebagai melakukan sesuatu dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa atau dikerah, dengan niat yang ikhlas atau setulus suci dan dengan tidak mengharapkan apa-apa pulangan kepada diri sendiri.

Dalam bahasa lain, misalnya bahasa Inggeris, terdapat perkataan “voluntarism” yang menurut *The Reader’s Digest-Oxford Wordfinder*, membawa erti “*the principle of relying on voluntary action rather than compulsion; the doctrine that the will is a fundamental or dominant factor in the individual or the universe; the doctrine that the Church or schools should be independent of the state and supported by voluntary contributions*”.

Perkataan “voluntary” juga bermaksud “*done, acting or able to act of one’s free will; unpaid work; built, brought about, produced, maintained, etc., by voluntary action or contribution*”. Perkataan “volunteer” juga merujuk “*a person who voluntarily undertakes a task or enters a military or other service, undertakes or offer one’s services, be a volunteer*”.

Dalam masyarakat Indonesia, tradisi kesukarelaan, antara lain, dicerminkan oleh konsep “gotong royong”. Gotong royong dilaksanakan

dalam kehidupan bermasyarakat saling menghormati dan empati, misalnya dalam membantu kerja-kerja membuat hajatan, turun ke sawah untuk menyemai dan menuai, menguruskan yang sakit dan kematian, pindah rumah dan sebagainya. Konsep gotong-royong mengakomodasi setiap anggota dalam sebuah masyarakat, yaitu dengan memberikan peranan kepada semua orang, dan masing-masing dengan gunanya.

Bagaimanapun, kesukarelaan memiliki makna yang berbeda kepada orang yang berbeda, kepada masyarakat yang berbeda dan kepada zaman yang berbeda. Ini adalah kerana makna kesukarelaan turut juga dipengaruhi oleh pelbagai faktor, seperti sejarah, politik, ekonomi dan budaya sesuatu masyarakat dan tempat.

Perkataan “kesukarelaan” biasanya digabungkan dengan perkataan “khidmat” atau “bakti” (*service*). Makna bakti juga berbedabeda seseorang, bagi sebagian orang, maksudnya “satu tradisi atau tanggungjawab agama atau moral”. Bagi yang lain melihatnya sebagai “suatu perlakuan yang jelas, yang tidak sentimental dan merupakan semangat keberkawanan”. Bagi yang lain bisa juga melihatnya sebagai “bukan saja kebaikan kemanusiaan, bahkan peluang untuk belajar tentang mereka yang diberikan bantuan bakti tersebut”.

Kesukarelaan juga dapat dijadikan ukuran atau gambaran tentang sifat-sifat kemanusiaan yang terdapat dalam diri seseorang atau sekelompok manusia. Orang yang sering terlibat dalam kerja-kerja sukarela akan dilihat sebagai seorang yang bersifat mulia. Namun jika yang tidak terlibat dalam kerja-kerja kesukarelaan akan dilihat sebagai seorang yang mementingkan diri sendiri.

Karena itu, apabila sesuatu kelompok manusia ingin memilih seseorang untuk diberikan sesuatu tugas atau tanggungjawab, misalnya menjadi pemimpin untuk sesuatu organisasi, maka alat ukur yang digunakan untuk memilih calon pemimpin tersebut ialah seseorang yang mempunyai banyak pengalaman dalam kerja atau program kesukarelaan.

Di samping itu, hidup dan bebasnya organisasi sukarela dapat juga menggambarkan kondisi demokrasi dalam sesebuah negara. Lazimnya di negara yang kerajaannya bersifat autokrasi, organisasi sukarela tidak diperkenankan untuk bergerak dengan bebas. Jika terdapat organisasi sukarela yang aktif, maka ia berkemungkinan besar adalah yang pandai berlindung atau yang memang ditubuhkan oleh elemen-elemen negara tersebut untuk menjadi agennya.

Pada waktu yang sama, keaktifan kerja-kerja kesukarelaan dapat menjadi gambaran kesadaran politik masyarakat di sesebuah negara. Ini terutamanya apabila kerja kesukarelaan melibatkan unsur-unsur gerakan dan perjuangan. Masyarakat yang tidak melek politik atau rendah kesadaran politiknya akan sukar memahami kerja sukarela yang berorientasi advokasi.

Organisasi-organisasi kesukarelaan, yang biasanya lebih dekat dengan denyut nadi rakyat, perlu dibawa oleh kerajaan untuk berpartisipasi dalam proses membuat keputusan, iaitu dengan mengamalkan konsep perundingan (*syura*) dalam governans atau tadbir urus (*governance*) negara. Tetapi, amalan perundingan hanya akan dapat berkembang dan memanfaatkan jika terdapat suasana yang

kondusif, kemerdekaan berfikir, kebebasan bersuara dan sikap terbuka, dan bukannya dalam suasana takut berbeda pendapat dengan seseorang yang lebih berkuasa.

B. Kesukarelaan Politik

Kesukarelaan politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.²

Sejalan dengan pengertian politik, kesukarelaan politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat kearah pencapaian tujuan tersebut.

Dalam pelaksanaan pemilu di suatu Negara ataupun dalam pelaksanaan pilkada langsung di suatu daerah, perilaku politik dapat berupa kesukarelaan masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada tersebut hal ini jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku politik dalam proposal penelitian ini kesukarelaan politik dapat dibagi dua, yaitu:³

- a. Kesukarelaan politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah.

² Sujijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. Semarang :Ikip Semarang Press. 1995. Hal 2

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Grasindo. 1999 hal 15-16

- b. Kesukarelaan politik warga Negara biasa (baik individu maupun kelompok) Yang pertama bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, sedangkan yang kedua berhak mempengaruhi pihak yang pertama dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan politik yang dilakukan oleh warga Negara biasa (individu maupun kelompok) disebut partisipasi politik.

Dalam melakukan kajian terhadap kesukarelaan politik, dapat dipilih tiga unit analisis yaitu :

- a. Aktor politik (meliputi aktor politik, aktivitas politik, dan individu warga negara biasa).
- b. Agregasi politik (yaitu individu aktor politik secara kolektif seperti partai politik, birokrasi, lembaga-lembaga pemerintahan).
- c. Topologi Kepribadian Politik (yaitu kepribadian pemimpin, seperti Otoriter, Machiavelist, dan Demokrat).

Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi kesukarelaan warga dalam politik, aktor politik (pemimpin, aktivis, dan warga biasa) yaitu :⁴

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa.
- b. Lingkungan sosial politik langsung yang membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah, dan

⁴ Ramlan Surbakti, *Ibid.*, hal 132

kelompok bergaul. Dari lingkungan ini, seorang aktor politik mengalami proses sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat dan norma kehidupan bernegara.

- c. Struktur kepribadian. Hal ini tercermin dalam sikap individu (yang berbasis pada kepentingan, penyesuaian diri dan eksternalisasi).
- d. Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

C. Kesukarelaan Warga dalam politik (Political voluntarism)

Digunakannya teori kesukarelaan warga dalam politik dalam proposal penelitian ini adalah karena, tingkat kesukarelaan warga dalam politik adalah faktor yang menentukan apakah Pemilu ataupun Pilkada yang berlangsung berhasil atau tidak, semakin tinggi tingkat kesukarelaan, maka tingkat keberhasilan Pemilu ataupun Pilkada semakin tinggi.

Dalam analisa Modern, kesukarelaan warga dalam politik merupakan suatu masalah yang penting dan banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara- negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai kesukarelaan warga dalam politik hanya memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, akan tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin sukarela dalam bidang politik khususnya

dalam hal pengambilan keputusan- keputusan mengena-mengenai kebijakan umum.⁵

Secara umum dapat dikatakan bahwa kesukarelaan warga dalam politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik secara bebas, tanpa paksaan dan bebas dari kepentingan individu dan kelompok.

Herbert McClosky berpendapat bahwa kesukarelaan warga dalam politik adalah kegiatan- kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁶

Berikut ini dikemukakan sejumlah “rambu-rambu” kesukarelaan warga dalam politik:⁷

Pertama, kesukarelaan warga dalam politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga Negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Karena sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya.

Kedua, kegiatan tersebut diarahkan untuk mempengaruhi perilaku selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti mengajukan alternative kebijakan umum, dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

Ketiga, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

⁵ Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008. Hal 367

⁶ Miriam Budiardjo *ibid.*,

⁷ Ramlan Surbakti, *Op.cit.*, hal. 141

Keempat, kegiatan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung yaitu mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah.

Kelima, mempengaruhi pemerintah melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilu, mengajukan petisi, bertatap muka, dan menulis surat atau dengan prosedur yang tidak wajar seperti kekerasan, demonstrasi, mogok, kideta, revolusi, dll.

Di Negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak kesukarelaan warga dalam politik, lebih baik. Dalam alam pikiran ini, tingginya tingkat kesukarelaan warga dalam politik menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya partisipasi politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

kesukarelaan warga dalam politik sebagai suatu bentuk kegiatan dibedakan atas dua bagian, yaitu:⁸

- a. *Kesukarelaan aktif*, yaitu kegiatan yang berorientasi pada output dan input politik. Yang termasuk dalam partisipasi aktif adalah, mengajukan usul mengenai suatu kebijakan yang dibuat pemerintah, menagukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan

kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.

- b. *Kesukarelaan pasif*, yaitu kegiatan yang hanya berorientasi pada output politik. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi ini hanya menuruti segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan.

Kemudian terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam kedua kategori ini, yaitu masyarakat yang menganggap telah terjadinya penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan. Kelompok tersebut disebut apatis (golput).

Kategori partisipasi politik menurut *Milbrath* adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan *Gladiator* meliputi:
 - 1) Memegang jabatan publik atau partai
 - 2) Menjadi calon pejabat
 - 3) Menghimpun dana politik
 - 4) Menjadi anggota aktif suatu partai
 - 5) Menyisihkan waktu untuk kampanye politik
- b. Kegiatan transisi meliputi
 - 1) Mengikuti rapat atau pawai politik
 - 2) Memberi dukungan dana partai atau calon
 - 3) Jumpa pejabat publik atau pemimpin politik
- c. Kegiatan *monoton* meliputi :
 - 1) Memakai symbol/identitas partai/organisasi politik

⁸ Ramlan Surbakti, *Ibid.*, hal 143

- 2) Mengajak orang untuk memilih
- 3) Menyelenggarakan diskusi politik
- 4) Memberi suara

d. Kegiatan apatis/masa bodoh

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik seseorang adalah :

- 1) Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
- 2) Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemimpinnya.

Berdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe kesukarelaan warga dalam politik yaitu:⁹

- a) Kesukarelaan warga dalam politik aktif jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi.
- b) Kesukarelaan warga dalam politik apatis jika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah.
- c) Kesukarelaan warga dalam politik pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi.
- d) Kesukarelaan warga dalam politik militant radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.

D. Perilaku Pemilih

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para konsestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan

kemudian memberikan suaranya kepada konsestan yang bersangkutan.¹⁰

Dinyatakan sebagai pemilih dalam Pilkada yaitu mereka yang telah terdaftar sebagai peserta pemilih oleh petugas pendata peserta pemilih. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konsituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstiuen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian termanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik dan seorang pemimpin.¹¹

Kesukarelaan pemilih dapat ditujukan dalam memberikan suara dan menentukan siapa yang akan dipilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada secara langsung. Pemberian suara atau *votting* secara umum dapat diartikan sebagai; “sebagai sebuah proses dimana seorang anggota dalam suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan ikut menentukan konsnsus diantara anggota kelompok seorang pejabat maupun keputusan yang diambil”.¹²

Pemberian suara dalam Pilkada secara langsung diwujudkan dengan memberikan suara pada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukungnya atau ditujukan dengan perilaku masyarakat dalam memilih pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun kesukarelaan pemilih menurut Surbakti adalah : “Aktivitas sikap pemberian suara oleh individu yang bekaitan erat dengan kegiatan

⁹ Ramlan surbakti, *ibid.*, hal 144

¹⁰ Firmanzah, *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007. Hal. 102.

¹¹ *Ibid.*, hal 105.

pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) didalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung-pen. Bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.¹³

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat *loyalitas* pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan.

Kesukarelaan pemilih juga sarat dengan *ideology* antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideology yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokkan antara ideology yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dibawa dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka.

Kesukarelaan pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu :¹⁴

a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis sebenarnya berasal dari Eropa, kemudian di Amerika dan pendidikan Eropa. Karena itu, flananngan menyebutnya

¹² Gosnel F Horal. Log.cit. hal 32

¹³ Ramlan Surbakti. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1997.hal 170

¹⁴ Muhammad Asfar. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004* .Pustaka Eureka.

sebagai model sosiologi politik Eropa. David Denver, ketika menggunakan pendekatan ini untuk menjelaskan kesukarelaan memilih masyarakat Inggris, menyebut model ini sebagai *social determinism approach*.

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan kesukarelaan memilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dsb) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dsb) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda); jenis kelamin (laki-perempuan); agama dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi- organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi; maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya., merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami kesukarelaan politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan sosiologis berkembang di Amerika Serikat berasal dari Eropa Barat, pendekatan Psikologis merupakan fenomena Amerika Serikat karena dikembangkan sepenuhnya oleh Amerika Serikat

melalui *Survey Research Centre* di Universitas Michigan. Oleh karena itu, pendekatan ini juga disebut sebagai Mazhab Michigan . Pelopor utama pendekatan ini adalah August Campbell.

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi- terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan kesukarelaan memilih. Variabel-variabel itu tidak dapat dihubungkan dengan perilaku memilih kalau ada proses sosialisasi. Oleh karena itu, menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menentukan kesukarelaan memilih (politik) seseorang.

Penganut pendekatan ini menjelaskan sikap seseorang-sebagai refleksi dari kepribadian seseorang-merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi kesukarelaan politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

c. Pendekatan Rasional

Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan kesukarelaan memilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politikpun maka masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara ke OPP yang dianggap mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian.

E. Orientasi Pemilih¹⁵

a. *Orientasi Policy-Problem Solving*

Ketika pemilih menilai seorang kontestan dari kacamata “policy-problem- solving” yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana kontestan mampu menawarkan program kerja atau solusi bagi suatu permasalahan yang ada. pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional (daerah) dan kejelasan-kejelasan program kerja partai-politik atau kontestan pemilu yang arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak dipilih.

b. *Orientasi Ideologi*

Pemilih yang cenderung mementingkan ideology suatu partai atau kontestan, akan mementingkan ikatan “ideologi” suatu partai atau kontestan, akan menekankan aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya, norma, emosi dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai atau kontestan pemilu, pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya ke partai atau kontestan tersebut.

F. Jenis-Jenis Pemilih

a. Pemilih Rasional

Pemilih jutamakan kemampuaenis ini memiliki orientasi yang tinggi terhadap *policy-Problem-Solving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu dengan program kerjanya,

¹⁵ Agung Wibawanto. *Menangkan Hati dan Pikiran Rakyat*. Yogyakarta: 2006, hal 137-144

mereka melihat program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.

Pemilih jenis ini memiliki cirri khas yang tidak begitu mementingkan ikatan Ideologi kepada suatu partai politik atau seorang kontestan. Hal yang terpenting bagi pemilih jenis ini adalah apa yang bisa (dan yang telah) dilakukan oleh sebuah partai atau seorang kontestan pemilu.

b. Pemilih Kritis

Proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui 2 hal yaitu *pertama*, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau kontestan pemilu mana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. *Kedua*, bisa juga terjadi sebaliknya di mana pemilih tertarik dulu dengan program kerja yang ditawarkan sebuah partai/kontestan baru kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang melatarbelakangi pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisis kaitan antara sistem partai ideology dengan kebijakan yang dibuat.

c. Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih

tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pemilu. Kebijakan seperti yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dll, dianggap sebagai prioritas kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah dimobilisasi selama masa kampanye, pemilih jenis ini memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu atau partai politik yang merupakan suatu kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

d. Pemilih Skepsis

Pemilih jenis ini tidak memiliki orientasi ideology yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, pemilih ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan menjadi suatu hal penting. Walaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, biasanya mereka melakukannya secara acak atau random. Mereka berkeyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti yang dapat terbagi bagi kondisi Daerah/Negara.

Setelah melihat beberapa jenis pemilih, para kontestan pemilu nanti harus bisa memahami segala jenis pemilih dan berusaha merebut suara pemilih tersebut, yaitu tentunya melalui kampanye. Karena dengan memahami jenis pemilih yang ada, kemungkinan untuk memenangkan pemilu menjadi semakin kuat. Mereka harus mampu meraih suara dari setiap jenis pemilih yang ada. Untuk itu mereka pada umumnya membutuhkan dukungan dari tokoh-tokoh ataupun hal-

hal yang membuat setiap jenis pemilih diatas mau mendukung mereka dalam pemilu (Pilkada) nanti.

G. Pentingnya Pemilu

1. Pengertian Pemilu

Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

2. Manfaat Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena :

- a. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
- b. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitusional.
- c. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
- d. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik

3. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan Perseorangan.

- a. Peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dari parpol atau gabungan parpol yang dapat mengajukan pasangan calon adalah yang memperoleh 15% (lima belas persen) kursi di DPRD atau 15% (lima belas persen) suara di DPRD pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
- b. Peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Perseorangan harus didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)
- c. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memilih:
 - 1) Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi;
 - 2) Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten;
 - 3) Walikota dan wakil walikota untuk Kota.

H. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Mulai bulan juni 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang pilkadasung tercermin dalam cara pemilihan

dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan :

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri.¹⁶

Dengan lahirnya UU No.32/2004 dan PP No. 6/2005, sebagaimana disebutkan dimuka, akhirnya pilkada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan. Dengan pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pilkada langsung layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik yang hampir memenuhi parameter demokratis.¹⁷

¹⁶ Joko J. Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar. 2005. Hal 1-2.

¹⁷ Ibid, hal 20

Bab 3

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Kondisi Obyektif Wilayah Penelitian

Kabupaten Lebong terletak di posisi 105°-108° Bujur Timur dan 02°,65'-03°,60' Lintang Selatan di sepanjang Bukit Barisan serta terklasifikasi sebagai daerah Bukit Range pada ketinggian 500-1.000 dpl. Secara Administratif kabupaten Lebong terdiri atas 13 Kecamatan dengan 11 kelurahan dan 100 desa. Luas wilayah keseluruhan 192.424 Ha (belum termasuk luas kecamatan Padang Bano yang masih bersengketa dengan Kabupaten Bengkulu Utara). Dari total tersebut 134.834,55 Ha adalah Kawasan Konservasi dengan peruntukan untuk Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat 111.035,00 Ha, Hutan Lindung 20.777,40 Ha dan Cagar Alam 3.022,15 Ha.

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Lebong (angka sementara) setelah dikurangi jumlah penduduk daerah sengketa antara Desa Padang Bano dengan Desa Renah Jaya (Kabupaten Bengkulu Utara) adalah 97.091 orang, yang terdiri atas 49.693 laki-laki dan 47.398 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut Kecamatan Lebong Utara, Lebong Selatan dan Lebong Tengah merupakan tiga kecamatan dengan jumlah terbanyak yaitu masing-masing berjumlah 15.296 orang, 13.406 orang dan 10.084 orang. Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Lebong Atas dengan jumlah penduduk 4.402 orang. Perbandingan laki-laki dan

perempuan atau sex ratio di Kabupaten Lebong adalah sebesar 104,84%. Dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Lebong hanya Kecamatan Uram Jaya yang sex ratio-nya kurang dari 100% yaitu sebesar 99,96%. Kecamatan dengan sex ratio tertinggi adalah Kecamatan Padang Bano yakni sebesar 133,97%. Dari hasil SP2010 diketahui laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 2,00% pertahun. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Uram Jaya yakni 6,73% dan yang terendah adalah Kecamatan Pinang Belapis sebesar 0,67%. Dengan luas wilayah 2.427,31 yang didiami 97.091 orang sebesar 40 jiwa/km . kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Lebong Utara sebesar 279 jiwa/km sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Padang Bano yakni 4 jiwa/km.

Jumlah penduduk hasil SP2010 di Kabupaten Lebong sebanyak 97.091 jiwa. Dengan jumlah penduduk hasil SP2000 sebesar 79.627 jiwa, maka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lebong per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 2,00%. Jika dilihat laju pertumbuhan penduduk perkecamatan yang tertinggi adalah Kecamatan Uram Jaya sebesar 6,73% sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Pinang belapis yaitu sebesar 0,67%. Sedang untuk Kecamatan Padang Bano tidak bisa dilihat laju pertumbuhannya karena Kecamatan Padang Bano merupakan daerah pemukiman baru, sehingga data jumlah penduduk pada tahun 2000 tidak ada. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Uram Jaya

dikarenakan Kecamatan Uram Jaya dekat dengan pusat kota, selain itu wilayah yang tadinya rawa-rawa masih terus berkembang dan masih memungkinkan mengakomodir kebutuhan perumahan penduduk di sekitarnya. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Uram Jaya sejalan dengan tingginya laju pertumbuhan rumah tangga dan pertumbuhan bangunan tempat tinggal. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang rendah di Kecamatan Pinang Belapis sebesar 0,67% dikarenakan kondisi wilayah Kecamatan Pinang Belapis yang tergolong sulit, selain itu kecamatan ini jauh dari pusat kota.

B. Pilkada Kabupaten Lebong

Tahapan pelaksanaan Pilbup Lebong diperkirakan mulai dilakukan pada pertengahan April 2015. Proses awalnya yaitu melakukan perekrutan tenaga PPK dan PPS. Sedangkan tahapan pendaftaran calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) diperkirakan dimulai Juli mendatang.

KPU pusat sudah mengeluarkan 6 draf rancangan PKPU terkait penyelenggaraan Pilkada tahun 2015. Dari draf tersebut tahapan pilkada disebutkan perekrutan PPK dan PPS mulai diselenggarakan 19 April hingga 18 Mei 2015 dan pendaftaran cabup-cawabup dilakukan pada tanggal 22-24 Juli 2015 mendatang. Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan, lanjut Sugianto, para bakal calon dilakukan setelah pendaftaran dari tanggal 22-28 Juli dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan dilakukan pada 29 Juli 2015. Untuk penelitian

berkas dan syarat calon dilakukan mulai 24-30 Juli dan penyampaian hasil penelitian dilakukan 31 Juli-1 Agustus 2015.

Masing-masing pasangan calon memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan persyaratan, baik yang didukung gabungan parpol maupun perseorangan. Setiap pasangan yang didukung oleh parpol, perbaikan dilakukan pada 2-4 Agustus 2015 dan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dilakukan 2-6 Agustus 2015. Proses penetapan pasangan calon yang maju melalui partai politik maupun yang maju melalui jalur independen akan dilakukan pada 24 Agustus 2015. Selanjutnya, pengundian nomor urut pasangan calon pada 25 Agustus 2015.

Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dimulai 9 Juli 2015. Sedangkan untuk pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih dimulai 24 Juli 2015 dan berakhir 2 Oktober 2015. Lalu daftar pemilih tetap tambahan baik yang belum terdaftar dalam DPT dilakukan pada 12-19 Oktober. Selanjutnya dilakukan penyampaian DPTb1 di setiap tingkatan dari tanggal 20-27 Oktober dan pengumuman DPTb oleh PPS dilakukan mulai 6-8 Desember 2015. Untuk pelaksanaan pemilihan berdasarkan draf yang dikeluarkan KPU dilaksanakan 9 Desember 2015.

C. Laporan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan seperti yang diinginkan serta dapat meningkatkan efisien dan efektivitas dalam

pelaksanaan penelitian sebelumnya dilakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu. Adapun persiapan tersebut adalah:

a. Menentukan Data yang akan diambil

- 1) Data tentang Kesadaran Warga dalam Politik
- 2) Data tentang Kebebasan Warga dalam Politik
- 3) Data tentang Komitmen Warga dalam Politik
- 4) Data tentang Tanggung Jawab Warga dalam Politik
- 5) Data tentang Keterlibatan Warga dalam Politik

Data tersebut diperoleh melalui angket yang disebarakan kepada sampel warga yang mempunyai hak pilih.

b. Persiapan Alat Ukur

Untuk melihat tingkat kesukarelaan warga dalam politik dengan 5 sub variabel, seperti telah dijelaskan sebelumnya penulis menggunakan alat ukur berupa:

1). Observasi dan Wawancara

Peneliti menggunakan observasi untuk memperoleh data mengenai bagaimana situasi politik khususnya para pemilih di Kabupaten Lebong. Selanjutnya sebagai studi awal peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga Kabupaten Lebong tentang Politik, Pemilukada, dan sikap warga terhadap penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lebong.

2). Angket

Penyusunan angket ini dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan-tahapan agar angket yang digunakan

sebagai alat ukur ini dapat memperoleh data yang baik dan tepat tentang kesukarelaan warga dalam politik; kesadaran, kebebasan, komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatan warga dalam pemilukada. Adapun tahapan-tahapan adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan definisi konseptualnya tentang kesukarelaan warga dalam politik; kesadaran, kebebasan, komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatan warga dalam pemilukada.
- b) Menetapkan batasan operasional tentang kesukarelaan warga dalam politik; kesadaran, kebebasan, komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatan warga dalam pemilukada.
- c) Menetapkan indikator-indikator dari kesukarelaan warga dalam politik; kesadaran, kebebasan, komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatan warga dalam pemilukada
- d) Menetapkan model pernyataan angket serta alternatif jawaban sesuai dengan rencana pengukuran.
- e) Menyusun sejumlah item sesuai dengan batasan konstruksional teoritik kesukarelaan warga dalam politik; kesadaran, kebebasan, komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatan warga dalam pemilukada.
- f) Mendiskusikan dengan tim peneliti guna penyempurnaan item pertanyaan.

- g) Memperbaiki dan menyempurnakan item pernyataan pada angket setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

Dari tahapan-tahapan yang telah peneliti lakukan maka tersusunlah angket tentang kesukarelaan warga dalam politik; kesadaran, kebebasan, komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatan warga dalam pemilukada dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Variabel kesadaran warga dalam politik yang terdiri dari 6 butir soal dengan indikator: Kesadaran Akan Hak Politik dan Kesadaran akan Kewajiban Politik.
- 2) Variabel kebebasan warga dalam politik yang terdiri dari 4 butir soal dengan indikator: Pemahaman Kebebasan Politik dan Penting kebebasan Politik.
- 3) Variabel komitmen warga dalam politik yang terdiri dari 5 butir soal dengan indikator: Keinginan sukseskan Pemilukada dan Peningkatan Kualitas Pemilukada
- 4) Variabel tanggung jawab warga dalam politik yang terdiri dari 5 butir soal dengan indikator: Pemahaman tentang Posisi Pemilih dan Peranserta Pemilih.
- 5) Variabel keterlibatan warga dalam politik yang terdiri dari 5 butir soal dengan indikator: Keterlibatan aktif dan Peningkatan kepercayaan publik

2. Pelaksanaan Penelitian

Setelah semua persiapan penelitian telah siap, maka peneliti

melaksanakan penelitian yang sebenarnya dalam penelitian ini penulis melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan observasi dan Wawancara

Observasi telah dilaksanakan dengan mengamati dan melihat secara langsung situasi politik khususnya para pemilih di Kabupaten Lebong. Selanjutnya sebagai studi awal peneliti melakukan wawancara dengan beberapa warga Kabupaten Lebong tentang Politik, Pemilukada, dan sikap warga terhadap penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Lebong.

b. Penyebaran angket

Angket kesukarelaan warga dalam politik; kesadaran, kebebasan, komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatan warga dalam pemilukada disebarkan secara langsung kepada warga yang menjadi sampel penelitian dan disebarkan langsung oleh peneliti.

Dari jawaban yang diberikan responden terhadap angket tersebut maka dilanjutkan dengan melakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian.

c. Melakukan Trianggulasi

Kesukarelaan warga dalam politik tersebut tidak hanya diukur dari kuantitatif murni, sehingga diperlukan pendalaman

D. Penyajian dan Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang berkaitan dengan Kesukarelaan warga dalam politik, dengan 5 sub-variabel dan

indikator yang telah dirumuskan. Hasil penelitian ini didapat dari penghitungan skor jawaban reponden dalam angket yang disebarkan peneliti 988 responden, selanjutnya dilakukan penghitungan secara persentase tingkat kualitas sikap yang muncul dari jawaban-jawaban tersebut. Tabulasi dan penghitungannya sebagaimana di bawah ini:

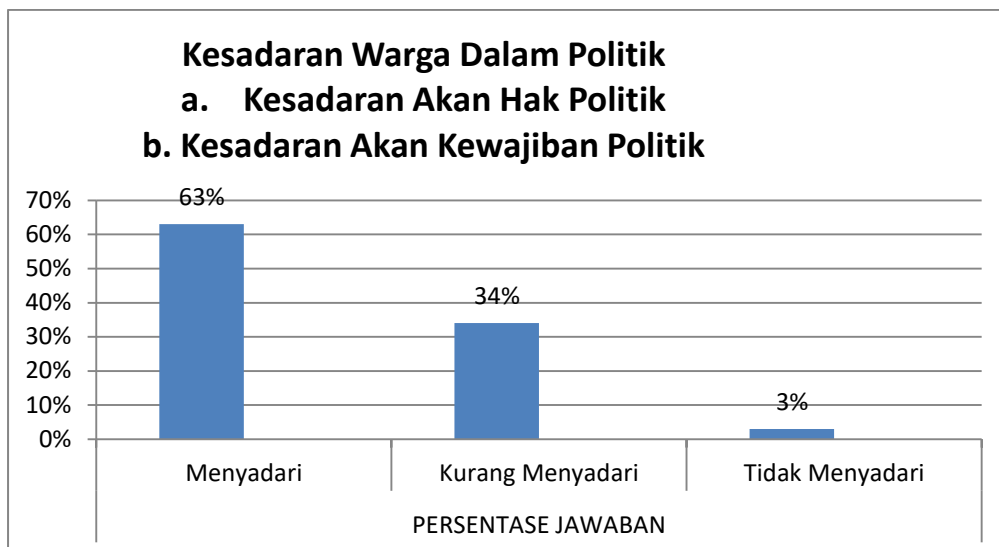
**Tabel Persentase
Kesukarelaan Warga dalam Politik
di Kabupaten Lebong**

No.	Sub VARIABEL	INDIKATOR	PERSENTASE JAWABAN		
			Tinggi	sedang	Rendah
1.	Kesadaran Warga dalam Politik	a. Kesadaran Akan Hak Politik b. Kesadaran akan Kewajiban Politik	63%	34%	3%
2.	Kebebasan Warga dalam Politik	a. Pemahaman Kebebasan Politik b. Penting kebebasan Politik	58%	25%	17%
3.	Komitmen Warga dalam Politik	a. Keinginan sukseskan Pemilu b. Peningkatan Kualitas Pemilu	84%	15%	1%
4.	Tanggung Jawab Warga dalam Politik	a. Tanggung jawab Posisi Pemilih b. Peranserta Pemilih	66%	21%	13%
5.	Keterlibatan Warga dalam Politik	a. Keterlibatan aktif b. Peningkatan kepercayaan publik	65%	21%	14%

1. Deskripsi

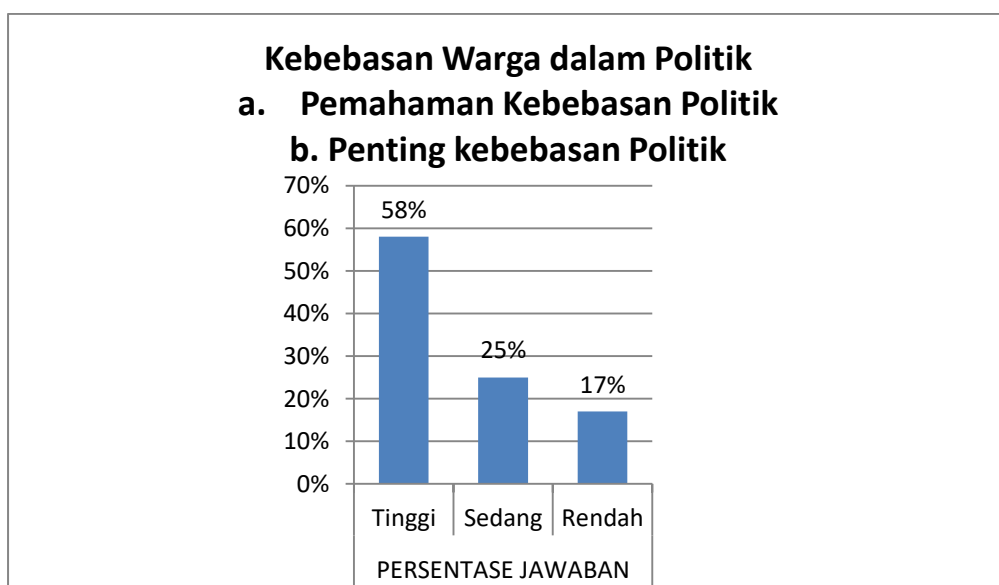
a. Kesadaran Warga dalam Politik

Dari hasil angket responden diperoleh bahwa 63% responden cukup menyadari hak dan kewajiban politik pada pemilu Tahun 2014, 34% kurang menyadari hak dan kewajiban politik pada pemilu Tahun 2014, dan 3% tidak menyadari hak dan kewajiban pada Pemilu tahun 2014. Hal ini bermakna tingkat kesadaran responden/warga dalam politik tentang adanya Pemilu cukup tinggi.



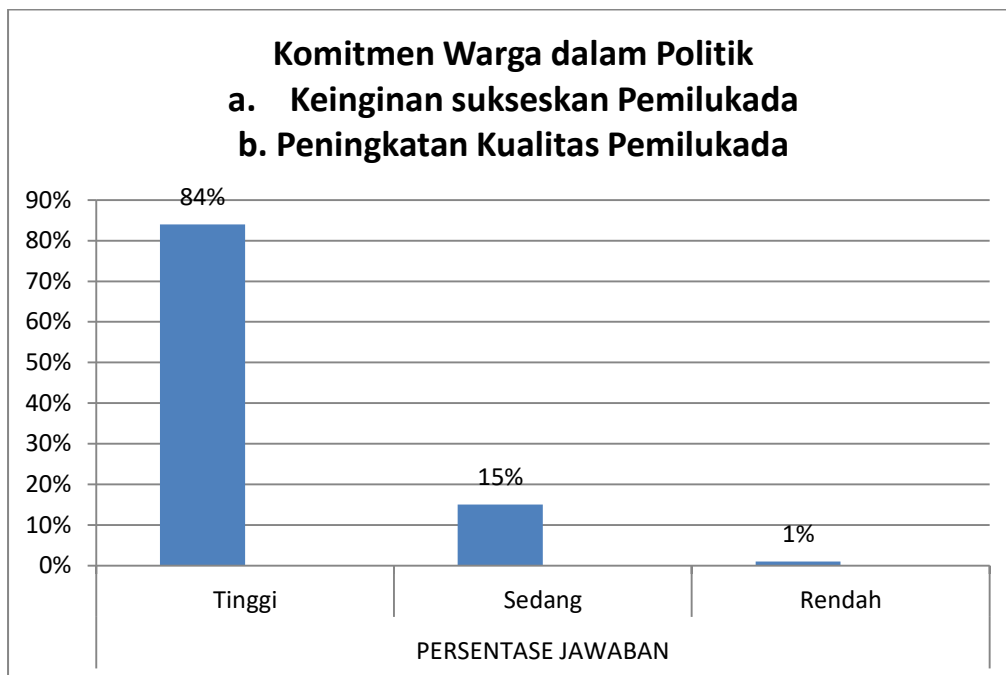
b. Kebebasan Warga dalam Politik

Dari hasil angket responden diperoleh bahwa 58% responden cukup pemahaman dan pentingnya kebebasan dalam politik pada pemilu Tahun 2014, 27% kurang memahami dan pentingnya kebebasan politik, dan 17% tidak memahami dan pentingnya kebebasan dalam politik pada Pemilu tahun 2014. Hal ini bermakna tingkat pemahaman dan pentingnya kebebasan dalam politik responden/warga dalam politik tentang adanya Pemilu cukup tinggi.



c. Komitmen Warga dalam Politik

Dari hasil angket responden diperoleh bahwa 84% responden berkomitmen mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014, 15% kurang berkomitmen mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada Pemilu tahun 2014, dan 1% tidak berkomitmen mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada Pemilu tahun 2014. Hal ini bermakna tingkat berkomitmen mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik responden/warga dalam politik tentang adanya Pemilu sangat tinggi.



d. Tanggung Jawab Warga dalam Politik

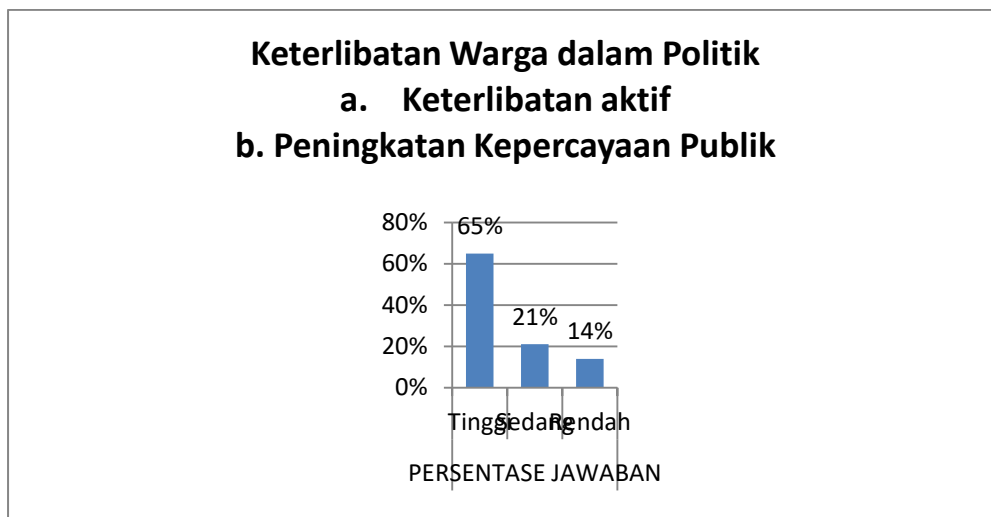
Dari hasil angket responden diperoleh bahwa 66% responden ikut bertanggung jawab dan berperan sebagai pemilih mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014, 21% kurang bertanggung jawab dan berperan sebagai pemilih mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014, dan 13% tidak

bertanggung jawab dan berperan sebagai pemilih mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014. Hal ini bermakna tingkat bertanggung jawab dan berperan sebagai pemilih mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014 cukup tinggi.



e. Keterlibatan Warga dalam Politik

Dari hasil angket responden diperoleh bahwa 65% responden ikut terlibat mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014, 21% kurang terlibat mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014, dan 14% tidak terlibat mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014. Hal ini bermakna tingkat keterlibatan mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014 cukup tinggi.



Dari perhitungan skor seluruh item sub-variabel kesadaran, kebebasan, komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatan warga dalam politik terhadap pemilu tahun 2014 ialah berada pada taraf cukup tinggi sehingga boleh diartikan bahwa tingkat kesukarelaan warga dalam politik terhadap Pemilu tahun 2014 berada pada tingkatan cukup tinggi yang berdekatan cenderung mendekati sedang. Dari temuan penelitian juga terungkap bahwa masalah yang terendah atau masalah utama yang dianggap responden dalam pilkada ialah kurangnya keterlibatan untuk ikut serta dalam proses/tahapan pemilu. Selain daripada itu, responden menganggap cukup pentingnya pilkada.

2. Pendalaman

Deskripsi data kesukarelaan warga dalam politik, selanjutnya didalami (trianggulasi) dengan melakukan observasi dan wawancara. Hal ini dilakukan untuk memperkuat data sehingga didapat kesimpulan yang

valid. Termasuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong kesukarelaan warga dalam politik pada pemilu 2014.

Pertanyaan lanjutan yang dilakukan peneliti adalah pengetahuan hak warga negara dalam Pilkada menunjukkan bahwa 62% responden mengetahui dan merasa berhak berpartisipasi dalam pemilu, 35% nya mengaku sangat berhak, hanya 3 % saja yang merasa tidak dan cukup berhak. Hal ini bermakna tingkat pengetahuan akan hak warga negara ialah sangat tinggi. Begitu juga ketika ditanya tentang sikap responden terhadap tidak terdaftarnya responden dalam daftar pemilih sementara, maka 35% menjawab akan mengurus dengan sadar, 28% mengurus kalau petugas datang, 21% kesadaran sendiri akan mengurusnya, dan hanya 3% yang tidak mau peduli.

Dari wawancara didapatkan bahwa rseponden mengaku yang memahami pentingnya partisipasi dalam pemilu ialah 47%, 25% cukup faham, 14% sangat faham, 10% kurang faham dan hanya 4% yang tidak faham. Hal ini bermakna bahwa tingkat kefahaman masyarakat Kabupaten Lebong tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada ialah tinggi. Seterusnya didapatkan pula bahwa 37% responden mengaku bahwa ia faham konsekuensinya jika tidak ikut memilih dalam pemilu, 27% cukup faham, 3% kurang faham, 11% sangat faham, dan 12% responden mengaku tidak faham. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang dampak tidak ikut serta dalam pilkada sudah tinggi/baik.

Ketika ditanya tentang pentingnya pemilu 59% responden mengaku penting, 26% merngaku sangat penting, 11% merasa cukup

penting, 3% mengaku tidak penting dan hanya 1% yang mengaku kurang penting suatu pemilu. Untuk frekuensi pencarian informasi tentang pemilu oleh responden diperoleh bahwa 37% mengaku cukup sering, 27% jarang sekali, 17% sering, 15% tidak pernah dan hanya 4% yang sangat sering. Hal ini bermakna bahwa taraf keinginan masyarakat mencari informasi sudah mulai baik. Responden juga mengaku bahwa hanya 10% saja yang merasa sangat mengetahui kandidat dan latar belakangnya, 15% ragu-ragu, 23% kurang mengetahui dan 41% yang sederhana atau cukup mengetahui.

Ketika ditanya pengetahuan responden tentang hari H pemungutan suara dalam Pemilu tahun 2014, 51% cukup mengetahui, 21% sangat mengetahui, 17% kurang mengetahui, 9% tidak mengetahui. Hal ini berarti bahwa tingkat ketahuan responden tentang hari H ialah tinggi.

E. Faktor-faktor Kesukarelaan Warga dalam politik

Faktor-faktor yang mendorong kesukarelaan warga dalam politik pada pemilu tahun 2014 di Kabupaten Lebong menurut pendapat beberapa responden setelah diwawancara secara mendalam. Responden dipilih berdasarkan kapasitas pengetahuannya tentang politik dan pemilu, jawaban tersebut dikonfirmasi dan dipetakan berdasarkan teori-teori yang ada.

Faktor faktor yang menyebabkan warga mau atau tidak mau ikut secara sukarela berpartisipasi dalam politik antara lain:

1. Kesadaran dan Situasi Politik

Berdasarkan kajian literatur dan dikonfirmasi dengan para aktivis

politik, LSM, dan para penggiat sosial, bahwa kesukarelaan politik warga dipengaruhi oleh kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Kesadaran akan hak dan kewajiban tersebut didorong oleh idealisme untuk mewujudkan tatanan bangsa dan negara yang lebih baik.

Sedangkan situasi politik adalah dinamika yang melingkupi proses atau perjalanan politik baik tingkat Nasional maupun tingkat lokal. Situasi politik lokal dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi dinamika politik secara langsung seperti, keluarga, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman. Demikian juga sirkulasi informasi, isu, agitasi, propaganda yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Situasi politik ini mempengaruhi sikap mental warga dalam mensikapi pemilu yang sedang berlangsung baik secara positif maupun negatif. Secara positif warga berperan secara sukarela membantu penyelenggara pemilu untuk menaikan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu. Namun sebaliknya secara negatif menimbulkan sikap antipati bahkan sikap oportunistis warga terhadap penyelenggaraan pemilu.

2. Status sosial dan ekonomi

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat bahwa status sosial dan ekonomi warga sangat menentukan tingkat kesukarelaan

warga dalam politik. Status sosial tersebut ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan.

Keturunan artinya berasal dari keluarga yang memiliki posisi terpandang di tengah masyarakat, sehingga memiliki kredibilitas dalam memerankan kegiatan-kegiatan politik. Tingkat pendidikan mempengaruhi pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam politik. Sedangkan jenis pekerjaan juga mempengaruhi tingkat dinamika pemikiran dan wawasan warga terhadap perkembangan politik yang sedang terjadi.

Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik. Minat dan perhatian tersebut juga dipengaruhi untuk memperbaiki situasi politik yang kondusif untuk keberlangsungan perekonomian yang ada.

3. Afiliasi politik

Berdasarkan hasil wawancara dengan aktivis politik dan penggiat sosial, kesukarelaan politik dipengaruhi oleh tingkat afiliasi warga terhadap aliran politik tertentu. Afiliasi berarti tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik

masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggung jawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.

4. Pengalaman berorganisasi

Para aktivis menyatakan pengalaman organisasi warga, membentuk sikap mental kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan kepudilian secara idealime untuk terlibat secara sukarela dalam dimensi politik. Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpolakan dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama. Sejalan dengan pendapat tersebut kesukarelaan warga dalam politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam sikap pertanggung jawaban bersama baik dalam situasi politik yang melibatkan dukungan.

Pengalaman berorganisasi mendorong warga untuk menciptakan situasi ideal yang didapat dari materi-materi ketika mendapatkan proses perkaderan di organisasi yang pernah diikuti. Pada umum organisasi yang diikuti oleh warga mendorong anggotanya untuk terlibat atau memiliki pengaruh di dalam lingkungan masyarakat.

5. Kepercayaan terhadap pemerintah

Hasil wawancara dengan beberapa warga menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesukarelaan warga dalam politik menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu, tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan sebaliknya, rendahnya kesukarelaan warga dalam politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

Kemudian kepercayaan masyarakat yang menganggap telah terjadinya penyimpangan sistem politik dari apa yang telah mereka cita-citakan, akhirnya melahirkan kelompok apatis (golput). Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.

6. Media Massa dan Diskusi-diskusi

Hasil wawancara dengan beberapa warga juga menyimpulkan bahwa peran media masa juga memberi sumbangsih terhadap pengetahuan, pemahaman, dan wawasan warga dalam menyikapi pemilu. Sehingga membentuk kesedaran, sikap independensi/kebebasan, komitmen, tanggung jawab, serta keterlibatan warga dalam politik.

Forum pertemuan baik sosialisasi, diskusi, atau seminar yang diselenggarakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemilu juga memberikan dampak kepada pengetahuan, pemahaman, dan wawasan warga dalam menyikapi pemilu. Sehingga membentuk kesadaran, sikap independensi/kebebasan, komitmen, tanggung jawab, serta keterlibatan warga dalam politik.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari deskripsi data kuantitatif deskriptif tersebut ditemukan bahwa variabel kesukarelaan warga dalam politik terhadap pemilu tahun 2014 ialah berada pada taraf cukup tinggi sehingga boleh diartikan bahwa tingkat kesukarelaan warga dalam politik terhadap Pemilu tahun 2014 berada pada tingkatan cukup tinggi yang berdekatan cenderung mendekati sedang.

Sedangkan menyebabkan tingkat kesukarelaan warga dalam politik cenderung mendekati sedang dalam Pemilu tahun 2014 ialah disebabkan oleh belum kuatnya kesadaran politik warga Kabupaten Lebong, sehingga melemahkan komitmen dan tanggung jawab warga dalam terlibat dalam kesuksesan Pemilu. Sedangkan peran pelaku-pelaku politik yang melakukan tindakan-tindakan yang menggoyahkan independensi warga dalam berpolitik. Hal ini dipengaruhi juga peran media dan pihak yang mengumpulkan warga dalam kepentingan-kepentingan politik praktis.

Walapun demikian, data kuantitatif deskriptif juga menunjukkan alasan lain tingkat kesukarelaan warga dalam politik Pemilu ini

disebabkan oleh alasan-alasan lain. Peneliti kemudian melakukan pendalaman melalui wawancara kualitatif. Setelah didalami lebih lanjut melalui wawancara dengan pertanyaan terbuka, maka alasan lain-lain yang dimaksud responden ialah oleh karena beberapa alasan yang pada umumnya terpola karena alasan: tidak disosialisasikan, karena tidak terdaftar dalam DPT, serta tidak mau peduli dengan Pemilu. Hal ini menunjukkan, bahwa persoalan belum tingginya tingkat kesukarelaan yang muncul tersebut disebabkan oleh masalah-masalah yang serupa dari data kuantitatif deskriptif sebelumnya, dimana pada dasarnya berhubungan dengan kinerja KPUD dan Pemerintah daerah, sosialisasi politik dan penyadaran politik, serta proses pembuatan DPT yang mengalami berbagai permasalahan.

Namun warga memiliki keyakinan bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati.

Bab 4

Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang merupakan penjelasan mengenai alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam penelitian itu dipandang menarik, penting dan perlu untuk diteliti. Perumusan masalah juga merupakan suatu usaha yang menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicari pemecahannya. Atau dengan kata lain perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah.

Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Data kuantitatif deskriptif tentang kesukarelaan warga dalam politik dengan sub-variabel kesadaran, kebebasan, komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatan warga dalam politik terhadap pemilu tahun 2014 ialah berada pada taraf cukup tinggi sehingga boleh diartikan bahwa tingkat kesukarelaan warga dalam politik terhadap Pemilu tahun 2014 berada pada tingkatan cukup tinggi yang berdekatan cenderung mendekati sedang.
 - a. Tingkat kesadaran warga dalam politik menunjukan; 63% responden cukup menyadari hak dan kewajiban politik pada pemilu Tahun 2014, 34% kurang menyadari hak dan kewajiban politik pada pemilu Tahun 2014, dan 3% tidak menyadari hak dan

kewajiban pada Pemilu tahun 2014.

- b. Kebebasan warga dalam politik menunjukan; 58% responden cukup pemahaman dan pentingnya kebebasan dalam politik pada pemilu Tahun 2014, 27% kurang memahami dan pentingnya kebebasan politik, dan 17% tidak memahami dan pentingnya kebebasan dalam politik pada Pemilu tahun 2014.
- c. Komitmen warga dalam politik menunjukan; 84% responden berkomitmen mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014, 15% kurang berkomitmen mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada Pemilu tahun 2014, dan 1% tidak berkomitmen mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada Pemilu tahun 2014.
- d. Tanggung jawab warga dalam politik menunjukan; 66% responden ikut bertanggung jawab dan berperan sebagai pemilih mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014, 21% kurang bertanggung jawab dan berperan sebagai pemilih mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014, dan 13% tidak bertanggung jawab dan berperan sebagai pemilih mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014.
- e. Keterlibatan warga dalam politik menunjukan; 65% responden ikut terlibat mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014, 21% kurang terlibat mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik pada pemilu Tahun 2014, dan 14% tidak terlibat mensukseskan dan meningkatkan kualitas politik

pada pemilu Tahun 2014.

2. Faktor faktor yang menyebabkan warga mau atau tidak mau ikut secara sukarela berpartisipasi dalam politik antara lain:
 - a. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Sedangkan situasi politik adalah dinamika yang melingkupi proses atau perjalanan politik baik tingkat Nasional maupun tingkat lokal.
 - b. Status sosial dan ekonomi warga sangat menentukan tingkat kesukarelaan warga dalam politik yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan.
 - c. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggung jawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.
 - d. Pengalaman organisasi warga, membentuk sikap mental kesadaran, pengetahuan, pemahaman dan kepedulian secara idealime untuk terlibat secara sukarela dalam dimensi politik.
 - e. Kepercayaan terhadap pemerintah menunjukkan bahwa rezim yang sedang berkuasa memiliki keabsahan yang tinggi. Dan

sebaliknya, rendahnya kesukarelaan warga dalam politik di suatu Negara dianggap kurang baik karena menunjukkan rendahnya perhatian warga terhadap masalah politik, selain itu rendahnya partisipasi politik juga menunjukkan lemahnya legitimasi dari rezim yang sedang berkuasa.

- f. Media masa juga memberi sumbangsih terhadap pengetahuan, pemahaman, dan wawasan warga dalam menyikapi pemilu. Serta forum pertemuan baik sosialisasi, diskusi, atau seminar yang diselenggarakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemilu juga memberikan dampak kepada pengetahuan, pemahaman, dan wawasan warga dalam menyikapi pemilu.

B. Implikasi Hasil Penelitian dan Saran

Hasil penelitian ini berimplikasi pada:

1. Tingkat kesukarelaan warga dalam politik yang sedang cenderung menuju rendah menunjukan partisipasi masyarakat dalam pemilu sehingga harus dijaga stabilitas dan pencitraan penyelenggaraan Pilkada ke depan.
2. Sosialisasi dan penyebaran informasi tentang sistem dan teknis penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan secara intensif dan masif.
3. KPU harus berkoordinasi dengan pihak terkait maupun dengan kompetitor agar terjaga tatanan penyelenggaran Pilkada yang bersih dan sehat.
4. Bagi masyarakat secara umum harus tetap berpandangan rasional dan objektif, sehingga tidak cepat terpengaruh oleh pemikiran dan tindakan yang dapat mengganggu penyelenggaran Pilkada ke depan.

BIBLIOGRAFI

- Asfar, Muhammad. *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*. Pustaka Eureka. 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta : Gramedia. 2008.
- Coles, Robert, 1993. *The Call of Service: a Witness to Idealism*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Drucker, Peter F., 1994. *Managing the Non-Profit Organization*. Oxford: Butterworth-Heinemann Ltd.
- Firmanzah, *Marketing Politik*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.2007.
- Horald, F Gosnel. 1934. *Ensyklopedia Of The Social Science*. New York : Mc Grew Hill Book Company.
- Kotler, Philip., Roberto, Eduardo L., 1989. *Social Marketing: Strategies for Changing Public Behavior*. New York: The Free Press.
- Malian, Sobirin. *Menakar Loyalitas dan Votalitas Pemilih Pada Pemilu 2004*.
- Prihatmoko, Joko j. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Semarang : Pustaka Pelajar. 2005.
- Sastroatmodjo, Sujijono. *Perilaku Politik*. Semarang. Ikip Semarang Press.1995.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : LP3ES. 1998.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo. 1999.
- Surbakti, Ramlan. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 1997.
- Undang-Undang
- United Nations Volunteers, 1999. Expert Group Meeting on Volunteering and Social Development. New York. 29-30 November 1999.
- United Nations, 1995. *World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond*. New York: General Assembly.

United Nations, 1998. *Lisbon Declaration on Youth Policies and Programmes*. Lisbon: First World Conference of Ministers Responsible for Youth.

United Nations, 1998. Resolution Adopted by the General Assembly, 52/17. *International Year of Volunteers 2001*. New York: General Assembly.

Usman, Husaini dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung : Bumi Aksara. 2004.

Wibawanto, Agung. *Menangkan Hati dan Pikiran Rakyat*. Yogyakarta : Pembaruan. 2005.



Lampiran 1

Kisi-kisi Penelitian

Kesukarelaan Warga dalam Politik Pada Pemilu di Kabupaten Lebong

Definisi Konseptual: Kesukarelaan (*Voluntary*), artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai kemauan bersama untuk mewujudkan cita-cita politik bersama.

Definisi Operasional: Kesukarelaan (*Voluntary*) warga dalam politik artnya satu situasi sikap mental dengan penuh kesadaran, kebebasan, komitmen, tanggung jawab, dan terlibat dalam proses politik.

No.	Sub VARIABEL	INDIKATOR	ITEM PERTANYAAN
1.	Kesadaran Warga dalam Politik	a. Kesadaran Akan Hak Politik b. Kesadaran akan Kewajiban Politik	1. Apakah pelaksanaan pemilihan umum Kepada Daerah adalah hak yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat? 2. Apakah pelaksanaan pemilihan umum Kepada Daerah adalah hak yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat? 3. Apakah setiap warga masyarakat wajib mengetahui tujuan pemilu kepala daerah? 4. Apakah setiap warga masyarakat wajib mengetahui tahapan pemilu kepala daerah? 5. Apakah setiap warga masyarakat wajib mengetahui standar kesuksesan pemilu kepala daerah? 6. Apakah setiap warga masyarakat wajib mengetahui tanda-tanda kecurangan pada pemilu kepala daerah?
2.	Kebebasan Warga dalam Politik	a. Pemahaman Kebebasan Politik b. Penting kebebasan Politik	1. Apakah warga masyarakat harus paham tentang azaz pemilu (langsung, umum, bebas, dan rahasia)? 2. Apakah azaz pemilu (langsung, umum, bebas, dan rahasia) merupakan standar kesuksesan pemilu kepala daerah? 3. Apakah kebebasan memilih adalah azas yang paling utama dalam pemilu kepala

			daerah? 4. Apakah kebebasan memilih adalah faktor yang paling utama menentukan terpilihnya kepala daerah yang berkualitas?
3.	Komitmen Warga dalam Politik	a. Keinginan sukseskan Pemilukada b. Peningkatan Kualitas Pemilukada	1. Apakah kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah merupakan tanggung jawab semua warga masyarakat? 2. Apakah peningkatan kualitas pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah merupakan tanggung jawab semua warga masyarakat? 3. Apakah pengawasan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah merupakan tanggung jawab semua warga masyarakat? 4. Apakah warga masyarakat wajib mencermati tiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah? 5. Apakah warga masyarakat wajib melaporkan jika terjadi kecurangan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah?
4.	Tanggung Jawab Warga dalam Politik	a. Pemahaman tentang Posisi Pemilih b. Peranserta Pemilih	1. Apakah pemilih memiliki posisi utama dalam pemilu Kepala daerah? 2. Apakah pemilih memiliki peran utama dalam pemilu Kepala daerah?
5.	Keterlibatan Warga dalam Politik	a. Keterlibatan aktif b. Peningkatan kepercayaan publik	1. Apakah setiap warga masyarakat wajib terlibat dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah? 2. Apakah setiap warga masyarakat wajib membantu dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah? 3. Apakah setiap warga masyarakat mempercayai sepenuhnya dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah? 4. Apakah setiap warga masyarakat wajib membantu KPU dalam meningkatkan pemaman masyarakat tentang pemilu kepala

			daerah? 5. Apakah setiap warga masyarakat wajib meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu kepala daerah?
--	--	--	--

Lampiran 2

Kuesioner Penelitian
Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Curup
Dan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lebong

Judul Penelitian :
Menakar Kesukarelaan Warga dalam Politik Pada Pemi di Kabupaten Lebong Tahun

Data Responden

Nama :	
Jenis Kelamin :	
Umur :	
Agama :	
Pendidikan :	
Pekerjaan :	
Alamat :	

Cara Menjawab : Beri tanada contreng (√) pada kolom jawaban yang anda inginkan.

1. Apakah pelaksanaan pemilihan umum Kepada Daerah adalah hak yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

2. Apakah pelaksanaan pemilihan umum Kepada Daerah adalah hak yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

3. Apakah setiap warga masyarakat wajib mengetahui tujuan pemilu kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

4. Apakah setiap warga masyarakat wajib mengetahui tahapan pemilu kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

5. Apakah setiap warga masyarakat wajib mengetahui standar kesuksesan pemilu kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

6. Apakah setiap warga masyarakat wajib mengetahui tanda-tanda kecurangan pada pemilu kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	

3.	Ragu-ragu	
----	-----------	--

7. Apakah warga masyarakat harus paham tentang azaz pemilu (langsung, umum, bebas, dan rahasia)?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

8. Apakah azaz pemilu (langsung, umum, bebas, dan rahasia) merupakan standar kesuksesan pemilu kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

9. Apakah kebebasan memilih adalah azas yang paling utama dalam pemilu kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

10. Apakah kebebasan memilih adalah faktor yang paling utama menentukan terpilihnya kepala daerah yang berkualitas?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

11. Apakah kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah merupakan tanggung jawab semua warga masyarakat?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

12. Apakah peningkatan kualitas pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah merupakan tanggung jawab semua warga masyarakat?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

13. Apakah pengawasan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah merupakan tanggung jawab semua warga masyarakat?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

14. Apakah warga masyarakat wajib mencermati tiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

15. Apakah warga masyarakat wajib melaporkan jika terjadi kecurangan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

16. Apakah pemilih memiliki posisi utama dalam pemilu Kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

17. Apakah pemilih memiliki peran utama dalam pemilu Kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

18. Apakah setiap warga masyarakat wajib terlibat dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

19. Apakah setiap warga masyarakat wajib membantu dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

20. Apakah setiap warga masyarakat mempercayai sepenuhnya dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

21. Apakah setiap warga masyarakat wajib membantu KPU dalam meningkatkan pemaman masyarakat tentang pemilu kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

22. Apakah setiap warga masyarakat wajib meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu kepala daerah?

No.	Pilihan Jawaban	Jawaban
1.	Ya	
2.	Tidak	
3.	Ragu-ragu	

Terima Kasih!!!!



Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia.

DAFTAR ISI



Halaman i
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PEMBAHASAN
BAB III PENUTUP

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai upaya, salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia.

SURAT KETERANGAN
Nomor : 032/12/insan.cita/SK/I/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adiyatna Arifin. M.Pd
Alamat : GRAHA INSAN CITA CURUP
Jabatan : Kepala Toko

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama/Peneliti : Fakhruddin, Baryanto, Muhammad Anshori
Judul Penelitian : Menakar Kesukarelaan Warga Dalam Politik Pada
Pemilu di Kabupaten Rejang Lebong
Presentase : 21 % (Low Plagiarism)
Perguruan Tinggi : IAIN Curup

Adalah benar-benar telah kami teliti dan check karya ilmiahnya tersebut diatas pada tanggal 11 Desember 2021 dengan metode software yang sudah terverifikasi oleh sistem internet (Turnitin & Plagiarism X Checker) sehingga dapat diketahui keabsahan karya tulis ilmiahnya untuk menghindari dari plagiat atau plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Admin Insan Cita Media,
Adiyatna Arifin, M.Pd

Awards & Certifications

"PlagiarismCheckerX is an award winning software. Yes, we dislike boasting off but happily share our achievements and worldwide recognition. The positive reviews that we have received from numerous independent, industry-related organizations and testing agencies are additional. So, when you download the software, keep in mind that the scanning capabilities and innovative features of PlagiarismCheckerX have worldwide praise."

